ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 246 PK/PID.SUS/2018 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK HAMBALANG OLEH ANAS URBANINGRUM

Sinintha Yuliansih Sibarani¹, Adzhani Putra Papalia Arief², Prakas Dewa Vremata Laia³
sininthayuliansih88@gmail.com¹, putraadzhani@gmail.com², prakasdewa04@gmail.com³
Universitas Pancasila

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 yang diajukan oleh Anas Urbaningrum dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional (P3SON) Hambalang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan PK ini mempertimbangkan fakta hukum secara komprehensif dan menyatakan pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun, denda, uang pengganti, serta pencabutan hak politik. Putusan ini menjadi preseden penting dalam pembaruan hukum pidana dan pemberantasan korupsi, khususnya terhadap pelaku dari kalangan pejabat publik.

Kata Kunci: Korupsi, Mahkamah Agung, Proyek Hambalang, Analisis Putusan, Yuridis Normatif.

ABSTRACT

This study aims to provide a juridical analysis of the Supreme Court's Decision Number 246 PK/Pid.Sus/2018 submitted by Anas Urbaningrum in a case involving corruption and money laundering related to the construction of the National Sports School and Training Center (P3SON) Hambalang project. The research method employed is normative juridical, using statutory, conceptual, and case approach by analyzing relevant legal norms and the court's legal reasoning. The findings indicate that the Supreme Court, in its judicial review ruling, confirmed that the applicant was proven guilty of corruption as defined in Articles 2 and 3 of the Indonesian Anti-Corruption Law, as well as money laundering. However, the Court took mitigating circumstances into account and imposed a sentence of eight years' imprisonment, a fine, compensation for state losses, and political rights revocation. This decision is a significant precedent in the development of criminal law and anti-corruption enforcement, particularly against public officials.

Keywords: Corruption, Supreme Court, Hambalang Project, Verdict Analysis, Juridical-Normative.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap tatanan hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegak hukum. Oleh karena itu, penanganan korupsi memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, termasuk pemidanaan yang proporsional dan transparan. Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, sangat krusial dalam menegakkan supremasi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi (KPK, 2021).

Salah satu kasus korupsi besar yang menarik perhatian publik adalah korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Proyek yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyeret sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR dan

menteri aktif saat itu. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah memutus perkara atas nama terdakwa Anas Urbaningrum melalui Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014. Putusan ini menjadi objek penting untuk dikaji karena menyangkut aspek pertanggungjawaban pidana pejabat publik dan penerapan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Melalui metode penelitian yuridis normatif, penting untuk menganalisis sejauh mana Mahkamah Agung menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memutus perkara tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, seperti unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, kerugian keuangan negara, hingga pembuktian keterlibatan terdakwa dalam proses penganggaran proyek. Analisis terhadap struktur argumentasi hukum dalam putusan ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan akademik, tetapi juga dapat menjadi masukan terhadap praktik peradilan tindak pidana korupsi di masa mendatang (Nurfadila et al., 2024).

Selain itu, putusan Mahkamah Agung ini menimbulkan berbagai respons dari masyarakat dan pakar hukum, terutama terkait dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dan pengembalian kerugian negara. Hal ini memunculkan wacana mengenai pentingnya konsistensi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural dalam putusan pengadilan. Masyarakat menaruh harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya menjadi alat formal legalistik, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan substantif dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar (Nurfadila et al., 2024).

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana aspek-aspek normatif telah dijalankan secara konsisten. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korupsi di Indonesia dan memperkuat landasan normatif dalam menindak kejahatan yang merugikan negara dan rakyat secara luas.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dan keadilan substantif dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018?
2. Bagaimana penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam perkara korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 dan Apakah Prinsip Proporsionalitas penting untuk pejabat yang terikat korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini relevan karena objek kajian berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga analisis dilakukan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta yurisprudensi. Seperti dijelaskan oleh Marzuki (2020), penelitian yuridis normatif bertujuan memahami hukum sebagai sistem norma yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga peradilan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, dan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan PT DKI Jakarta Nomor

74/Pid/TPK/2014/PT.DKI. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penafsiran, berupa jurnal hukum, buku ajar, dan pendapat pakar hukum pidana. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif analitis, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum yang berkaitan dengan perkara, lalu memberikan argumentasi hukum berdasarkan asas-asas hukum dan pendapat ahli. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menilai konsistensi antara putusan hakim dengan prinsip hukum yang berlaku, seperti asas legalitas, dan asas proporsionalitas. Penelitian ini tidak bersifat empiris, tetapi berbasis logika hukum normatif yang sistematis dan rasional dalam menilai kebijakan peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan pejabat publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, pembahasan memuat analisis hasil penelitian untuk memberikan jawaban atau solusi dari masalah penelitian yang diangkat. Dengan mengacu pada beberapa rincian dalam pembahasan, maka dapat menggunakan penulisan sub bab seperti di bawah ini.

1. Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan substantif

Penerapan asas kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana menjadi aspek fundamental dalam menilai legitimasi sebuah putusan hakim. Dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) Anas Urbaningrum dengan Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung menghadapi dilema antara mempertahankan kepastian hukum atas putusan kasasi sebelumnya dan mempertimbangkan keadilan substantif melalui fakta-fakta baru (*novum*) yang diajukan pemohon. Asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) menuntut adanya ketegasan dan kejelasan hukum agar individu dapat memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tiga nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) (Marzuki, 2020).

Dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Kasasi Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung memperberat hukuman Anas Urbaningrum menjadi 14 tahun penjara dengan mempertimbangkan kerugian negara, peran terdakwa sebagai pejabat publik, serta upaya memperkaya diri sendiri dan partai politik. Namun dalam PK Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, MA justru menurunkan hukuman menjadi 8 tahun penjara. Pertimbangan hakim mengacu pada fakta bahwa sebagian besar bukti telah diperiksa dan dinilai di tingkat pertama, serta *novum* yang dianggap signifikan untuk menilai kembali proporsionalitas hukuman. Dalam konteks ini, MA tampak mencoba menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan berdasarkan kondisi objektif terdakwa.

Dari aspek keadilan, MA menilai bahwa terdakwa telah menjalani hukuman cukup lama, tidak menikmati langsung dana korupsi, dan adanya pertimbangan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan penerapan asas keadilan korektif, di mana hukum dipakai untuk memulihkan keseimbangan akibat suatu kesalahan, seperti dijelaskan oleh Aristoteles dan dikembangkan dalam doktrin hukum modern oleh Satjipto Rahardjo. Namun pendekatan ini memunculkan kontroversi di kalangan praktisi hukum karena berpotensi melemahkan efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh putusan sebelumnya yang lebih berat.

Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, Anas dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan vonis 8 tahun. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan PT DKI Jakarta Nomor 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI, yang menegaskan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran terdakwa dalam proyek Hambalang. Namun kemudian diperberat di tingkat kasasi,

dan terakhir kembali diringankan melalui putusan PK. Alur ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum cenderung terganggu karena terjadi perubahan substansi pidana meskipun tidak terdapat perbedaan signifikan dalam konstruksi hukum pembuktiannya.

Namun, Mahkamah Agung dalam PK tersebut menyatakan bahwa PK merupakan bagian dari hak terpidana untuk memperoleh keadilan, selama terdapat novum yang sah dan relevan. Hal ini sejalan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang memberikan ruang untuk mengajukan PK apabila ditemukan keadaan baru yang dapat menggugurkan putusan sebelumnya. Dengan demikian, putusan PK dapat dilihat sebagai bentuk kompromi antara *due process of law* dengan prinsip keadilan yang dinamis. Meski demikian, implikasinya terhadap kepastian hukum tetap menjadi catatan kritis.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kepastian hukum dan keadilan dalam putusan PK terhadap Anas Urbaningrum cenderung menekankan aspek keadilan substantif. Namun, hal ini dilakukan dengan tetap mematuhi prosedur hukum yang ada, termasuk mengakui PK sebagai hak hukum terakhir bagi terpidana. Dalam konteks pemberantasan korupsi, putusan ini menyisakan perdebatan apakah pendekatan tersebut justru melemahkan pesan moral dan *deterrent effect* dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan asas hukum agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

2. Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Dan Prinsip Proporsionalitas Bagi Pejabat Yang Terikat Korupsi

Pidana tambahan merupakan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pidana tambahan sering dijatuhkan untuk memperkuat efek jera dan mencegah pelaku kembali memanfaatkan posisi politik atau jabatannya. Salah satu bentuk pidana tambahan yang cukup signifikan adalah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, sebagaimana dijatuhkan kepada Anas Urbaningrum dalam perkara korupsi proyek Hambalang. Dalam Putusan MA Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun kepada Anas Urbaningrum setelah selesai menjalani pidana pokok.

Penjatuhan pidana tambahan ini mengacu pada kewenangan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan pemberian pidana tambahan berupa "pencabutan hak tertentu". Hak politik termasuk dalam hak yang dapat dicabut karena relevansinya dengan jabatan publik yang disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. Menurut Prof. Andi Hamzah (2021), pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sah secara hukum apabila dijatuhkan melalui putusan pengadilan, karena merupakan bentuk pembatasan hak yang dijamin konstitusi.

Kasus pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Sama seperti dalam putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020, terdakwa Zainudin Hasan, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Lampung, terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain hukuman pokok, ia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik, yaitu hak untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 3 (tiga) tahun. setelah pidana pokok sudah dijalankan.

Prinsip proporsionalitas adalah salah satu prinsip penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seimbang dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukannya. Prinsip ini tidak hanya menggarisbawahi keadilan bagi pelaku tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan, di mana hukuman dianggap adil ketika sesuai dengan tingkat kejahatan dan

dampaknya. Di Indonesia, prinsip proporsionalitas menjadi semakin relevan dalam konteks reformasi hukum dan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, khususnya dengan meningkatnya sorotan terhadap keadilan dalam pengenaan sanksi pidana. Hal ini juga dijelaskan di peraturan yang tertulis di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang pedoman pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan”.

Secara filosofis, penerapan prinsip proporsionalitas juga berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang berwenang. Jika hukuman tidak proporsional, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Prinsip ini juga menjaga agar tidak ada diskriminasi dalam penjatuhan hukuman, sehingga setiap pelaku diperlakukan secara setara di depan hukum. Dalam konteks negara hukum, prinsip proporsionalitas menjadi alat untuk mengontrol kewenangan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu. Dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan yuridis tersebut, prinsip proporsionalitas menjadi aspek penting dalam upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Mengingat pentingnya prinsip ini, diperlukan pedoman yang lebih rinci dan eksplisit bagi hakim serta aparat penegak hukum lainnya untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dan adil. Hal ini juga menjadi upaya konkret untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana.

Namun, muncul pertanyaan hukum apakah penjatuhan kembali pidana tambahan dalam putusan PK sudah memenuhi prinsip proporsionalitas tersebut. Dalam hal ini, terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana tambahan serupa dalam Putusan Kasasi No. 1261 K/Pid.Sus/2015, namun dalam PK Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, pidana tambahan tersebut kembali dijatuhkan, meskipun pokok perkara tidak berubah secara substansi. Hal ini menimbulkan polemik karena putusan PK seolah “mengulangi” atau menegaskan kembali sanksi tambahan yang telah dijatuhkan.

Meski demikian, secara yuridis putusan PK bukanlah pengulangan penjatuhan pidana, melainkan merupakan koreksi atau perubahan dari putusan sebelumnya. Dalam PK, seluruh amar putusan dinilai ulang, dan hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kembali bentuk dan lamanya pidana, termasuk pidana tambahan. Hal tersebut sudah memenuhi pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang termuat dalam pasal 3 huruf c “mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan huruf d “mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam meniatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi”. Sehingga menurut analisis penulis putusan pada PK ini telah memenuhi kesesuaian pada prinsip proporsionalitas yaitu Tindakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Artinya, tindakan tersebut harus relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Majelis hakim bukan tanpa dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dari terdakwa, melainkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar terdakwa tidak bisa mengulangi perbuatan tersebut menggunakan jabatannya.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita (2020) yang menyatakan bahwa penerapan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik dalam kasus korupsi harus dipandang sebagai instrumen penegakan etika dan integritas pejabat publik. Oleh karena itu, selama prosedur pengadilan diikuti dan pidana tambahan dijatuhkan oleh

pengadilan yang berwenang. Maka dalam kasus Anas Urbaningrum pidana tambahan tersebut justru dianggap sebagai bagian dari upaya sistemik untuk membersihkan sektor publik dari residivis moral.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kepastian hukum dan keadilan oleh majelis hakim dalam perkara Peninjauan Kembali Anas Urbaningrum mencerminkan upaya menyeimbangkan prinsip legalitas dengan rasa keadilan substantif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang pedoman pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun sebelumnya Mahkamah telah memperberat hukuman dalam putusan kasasi, dalam putusan PK ini Mahkamah mempertimbangkan fakta baru serta hal-hal yang meringankan untuk mengoreksi vonis menjadi lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme PK dalam hukum Indonesia dapat berfungsi sebagai korektif terhadap putusan yang dianggap kurang memperhatikan kondisi objektif, selama tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam putusan PK tersebut juga sah secara yuridis, dan mencerminkan komitmen hukum terhadap pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat publik. Penjatuhan pidana tambahan ini telah sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan legalitas, serta bertujuan menjaga integritas lembaga negara dari pelaku yang terbukti menyalahgunakan kewenangan politik. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga mencerminkan arah politik hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, konsisten, dan berpihak pada kepentingan publik.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan agar di masa mendatang dilakukan kajian komparatif dengan putusan-putusan serupa dalam kasus korupsi pejabat publik, untuk mengidentifikasi pola penerapan hukum yang konsisten atau sebaliknya.

Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan politik dari putusan Mahkamah Agung perlu dilakukan, khususnya terkait pencabutan hak politik, untuk menilai pengaruhnya terhadap kepercayaan publik dan stabilitas demokrasi. Mahkamah Agung atau pembentuk undang-undang juga diharapkan untuk menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik, guna mencegah multitafsir dan memastikan keseragaman putusan.

Penulis juga menyarankan agar Mahkamah Agung meningkatkan transparansi dalam mengungkap alasan pertimbangan hukum, terutama dalam hal pemberian keringanan hukuman, agar putusan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Akhirnya, penelitian hukum di bidang ini perlu terus dikembangkan untuk memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2021). *Hukum Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2020). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. *Wetboek van Strafrecht*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*

Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2014). Putusan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2015). Putusan Nomor 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.